

**PERAN PEMERINTAHAN DALAM POLITIK PENDIDIKAN: IMPLIKASINYA TERHADAP SEKOLAH DAN SISWA DI MTS AL-IKHLAS DALAN LIDANG**

**Amru Abdul Wadud<sup>1</sup>, Zainal Efendi Hsb<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: [muhammadamrukita@gmail.com](mailto:muhammadamrukita@gmail.com), [zainal80.yes@gmail.com](mailto:zainal80.yes@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to understand in depth how the role of government in educational politics affects the conditions of schools and students at MTs Al-Ikhlal Dalan Lidang. Using a qualitative approach and case study method, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies. The results of the study indicate that the role of the government, especially through the Ministry of Religion, greatly determines the direction and practice of education in this madrasah. Education policies such as the Independent Learning Curriculum, school operational assistance (BOS), and teacher training programs have a real impact on the learning system, school management, and student learning experiences. On the one hand, these policies provide direction and support for improving the quality of education. However, on the other hand, their implementation faces major challenges, including limited facilities, lack of ongoing training, complex administrative bureaucracy, and the incompatibility of policies with local conditions. Students benefit from more structured teaching materials, but also face academic pressure and technological barriers in learning. These findings emphasize that although the government has an important role in shaping the national education system, the effectiveness of policies is highly dependent on the ability to adapt at the local level and real support for the needs of schools and students in the region.*

**Keywords:** Education Politics, Role of Government, MTs Al-Ikhlal, Policy Implementation, Madrasah Education

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran pemerintahan dalam politik pendidikan memengaruhi kondisi sekolah dan siswa di MTs Al-Ikhlal Dalan Lidang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama, sangat menentukan arah dan praktik pendidikan di madrasah ini. Kebijakan pendidikan seperti Kurikulum Merdeka Belajar, bantuan operasional sekolah (BOS), serta program pelatihan guru memiliki dampak nyata terhadap sistem pembelajaran, pengelolaan sekolah, dan pengalaman belajar siswa. Di satu sisi, kebijakan tersebut memberikan arah dan dukungan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Namun di sisi lain, pelaksanaannya menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, birokrasi administrasi yang kompleks, serta ketidaksesuaian kebijakan dengan kondisi lokal. Siswa mengalami manfaat dari materi ajar yang lebih terstruktur, namun juga menghadapi tekanan akademik dan hambatan teknologi dalam pembelajaran. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk sistem pendidikan nasional, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kemampuan adaptasi di tingkat lokal serta dukungan nyata terhadap kebutuhan sekolah dan siswa di daerah.*

**Kata Kunci:** Politik Pendidikan, Peran Pemerintah, MTs Al-Ikhlal, Implementasi Kebijakan, Pendidikan Madrasah

**PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Di balik penyelenggaraan pendidikan, terdapat kebijakan dan keputusan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk intervensi dalam rangka mengatur arah, isi, serta tujuan pendidikan nasional. Dalam konteks ini, politik pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis di bidang pendidikan (Asdrayany et al., 2023; Rahmad et al., 2023). Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga dalam mengatur kurikulum, standar penilaian, distribusi sumber daya, hingga regulasi tenaga pendidik. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan-kebijakan tersebut kerap menimbulkan berbagai

tantangan di lapangan (Bararah, 2020). Terutama ketika diterapkan pada lembaga pendidikan berbasis keagamaan seperti madrasah, yang memiliki kekhasan tersendiri dalam sistem dan pendekatan pembelajaran. MTs Al-Ikhlas Dalam Lidang, sebagai salah satu madrasah yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses dan sumber daya, menghadapi berbagai problematika dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional. Beberapa permasalahan yang sering muncul di antaranya adalah keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran, kurangnya pelatihan intensif bagi guru terkait kebijakan kurikulum baru, serta minimnya ketersediaan perangkat teknologi yang mendukung digitalisasi pendidikan.

Selain itu, adanya kebijakan sentralistik dari pemerintah terkadang kurang memperhatikan konteks lokal yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Hal ini menyebabkan munculnya kesenjangan antara idealisme kebijakan dengan kenyataan di lapangan (Ridwan & Sumirat, 2021). Misalnya, pelaksanaan program-program pemerintah seperti Kurikulum Merdeka atau Asesmen Nasional masih dirasa membebani sebagian guru dan siswa karena kurangnya kesiapan teknis maupun psikologis. Di sisi lain, tuntutan administrasi yang tinggi kepada pihak sekolah sering kali menyita waktu dan energi yang seharusnya difokuskan pada pengembangan kualitas pembelajaran. Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh pihak sekolah sebagai institusi, tetapi juga langsung menyentuh siswa. Ketimpangan dalam sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya dukungan pembelajaran yang kontekstual, serta tekanan dari sistem evaluasi nasional, dapat menurunkan motivasi belajar dan menimbulkan kesenjangan prestasi antarsiswa (Zulqaidah et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana peran pemerintah dalam politik pendidikan berimplikasi secara nyata terhadap dinamika pendidikan di MTs Al-Ikhlas Dalam Lidang.

Penelitian ini penting dilakukan karena pendidikan tidak hanya merupakan tanggung jawab lembaga sekolah, tetapi juga merupakan hasil dari dinamika kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, peran pemerintah sangat dominan dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan melalui kebijakan-kebijakan strategis. Namun demikian, tidak semua kebijakan tersebut berjalan efektif di semua satuan pendidikan, khususnya di madrasah yang berada di daerah dengan keterbatasan fasilitas dan sumber daya seperti MTs Al-Ikhlas Dalam Lidang. Maka dari itu, perlu ada kajian yang mengungkap secara langsung bagaimana kebijakan pendidikan dari pemerintah diimplementasikan, serta bagaimana dampaknya terhadap sekolah dan siswa secara nyata. Penelitian ini juga penting sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pendidikan yang selama ini dijalankan. Dengan menelaah langsung kondisi sekolah dan pengalaman para siswa, guru, serta pengelola madrasah, penelitian ini dapat memberikan masukan yang objektif terhadap pemerintah mengenai aspek-aspek kebijakan yang perlu diperbaiki, disesuaikan, atau dikuatkan agar benar-benar berpihak kepada kemajuan pendidikan. Selain itu, studi ini dapat menjadi jembatan antara kebijakan makro di tingkat pusat dengan praktik mikro di tingkat sekolah, sehingga kesenjangan antara idealisme kebijakan dan realitas pelaksanaan dapat diminimalkan.

Penelitian ini memiliki urgensi dalam memperjuangkan keadilan pendidikan, terutama bagi lembaga pendidikan Islam yang selama ini sering kali kurang mendapatkan perhatian secara merata dalam pelaksanaan kebijakan nasional. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan, kendala, dan potensi madrasah dalam menghadapi berbagai perubahan dan tuntutan pendidikan modern. Hasil penelitian ini tidak hanya akan memperkaya khazanah akademik di bidang politik pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di tingkat akar rumput. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam politik pendidikan yang berdampak langsung terhadap kebijakan dan praktik pendidikan di tingkat satuan pendidikan, khususnya di MTs Al-Ikhlas Dalam Lidang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena fokus utamanya adalah memahami secara mendalam bagaimana peran pemerintahan dalam politik pendidikan berdampak pada kondisi sekolah dan siswa di MTs Al-Ikhlas Dalam Lidang (Sugiyono, 2015). Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mengungkap dinamika sosial dan kebijakan yang berlangsung dalam konteks lokal tertentu. Peneliti berusaha menangkap realitas yang kompleks melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian dan pengamatan terhadap situasi yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan di lingkungan sekolah untuk memahami kondisi nyata yang dialami siswa dan guru, serta bagaimana kebijakan pendidikan diterapkan secara praktis. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur kepada berbagai informan kunci, termasuk kepala madrasah, guru, siswa, orang tua siswa, dan perwakilan dari Kantor Kementerian Agama setempat (Sugiyono, 2018). Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan kebijakan pendidikan, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kualitas pembelajaran, kesejahteraan siswa, dan pengelolaan lembaga pendidikan. Dengan pendekatan ini, data yang diperoleh tidak hanya bersifat faktual, tetapi juga reflektif dan kontekstual.

Selain itu, dokumentasi menjadi sumber data pendukung yang sangat penting. Peneliti mengkaji berbagai dokumen resmi seperti kurikulum nasional dan kurikulum madrasah, Peraturan Menteri Pendidikan atau Kementerian Agama, data

akademik siswa, laporan pelaksanaan program bantuan pemerintah, serta dokumen kebijakan lainnya yang relevan. Analisis terhadap dokumen ini memberikan kerangka struktural untuk memahami bagaimana kebijakan nasional diinterpretasi dan diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Proses analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik. Data yang diperoleh dari berbagai sumber direduksi, dikategorikan, dan dianalisis untuk menemukan tema-tema utama yang berkaitan dengan peran pemerintah, kebijakan pendidikan, serta dampaknya terhadap sekolah dan siswa. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode untuk meningkatkan keabsahan temuan, yakni dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai narasumber dan metode (wawancara, observasi, dan dokumentasi) agar hasilnya lebih terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Peran Pemerintah dalam Politik Pendidikan di MTs Al-Ikhlas Dalam Lidang

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah, guru, serta beberapa siswa dan orang tua, ditemukan bahwa kebijakan pendidikan yang digariskan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama, sangat berpengaruh terhadap dinamika pendidikan di madrasah ini. Peran pemerintah tampak jelas dalam aspek penyediaan kurikulum, regulasi administratif, bantuan operasional, dan program peningkatan mutu pendidikan. Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, menetapkan kurikulum nasional yang harus diikuti oleh MTs Al-Ikhlas. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar, misalnya, memerlukan penyesuaian signifikan dalam pendekatan pembelajaran yang sebelumnya bersifat lebih normatif dan konvensional. Kepala madrasah menyatakan bahwa transisi ini menuntut pelatihan intensif bagi guru dan pembaruan perangkat ajar. Di sisi lain, guru merasa bahwa fleksibilitas kurikulum memberi peluang untuk mengkontekstualisasikan materi ajar sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan budaya lokal.

Pemerintah berperan dalam memberikan bantuan dana seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar operasional madrasah. Bantuan tersebut terbukti membantu sekolah dalam pengadaan sarana belajar seperti buku, alat peraga, dan peningkatan fasilitas belajar. Namun, terdapat keluhan dari pihak sekolah terkait keterlambatan pencairan dana dan ketatnya laporan administrasi yang menghambat fleksibilitas penggunaan anggaran. Pemerintah juga menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi guru melalui program PPG dan pelatihan daring. Guru-guru MTs Al-Ikhlas mengaku mendapatkan wawasan baru tentang pedagogi modern dan manajemen kelas, namun mereka juga mengeluhkan beban administratif dan kurangnya pendampingan pasca-pelatihan. Ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memiliki niat baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan, implementasi teknisnya masih menghadapi tantangan. Dampak dari politik pendidikan ini terhadap siswa cukup signifikan. Di satu sisi, siswa memperoleh akses pendidikan yang lebih terstandar, dengan materi ajar yang lebih relevan dan adaptif. Namun, di sisi lain, penerapan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal, seperti keterbatasan akses internet untuk pembelajaran daring, menyulitkan sebagian siswa. Selain itu, siswa merasakan tekanan akademik yang meningkat karena standar penilaian yang lebih kompetitif dan terpusat.

#### 2. Implikasi Kebijakan Pendidikan terhadap Sekolah dan Siswa

Penelitian ini mengkaji bagaimana peran pemerintahan dalam merancang dan mengarahkan politik pendidikan berdampak langsung terhadap praktik pendidikan di tingkat sekolah dan siswa, dengan mengambil MTs Al-Ikhlas Dalam Lidang sebagai studi kasus. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan administratif, tetapi sebagai bagian dari proses politik yang melibatkan negara sebagai aktor utama dalam menentukan arah dan bentuk pendidikan nasional. Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan lembaga terkait, berperan dalam menyusun kurikulum, menetapkan standar mutu, mendistribusikan anggaran, dan menyediakan program peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Semua elemen ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana pendidikan dilaksanakan di sekolah-sekolah, termasuk di madrasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap keberlangsungan dan kualitas pendidikan di MTs Al-Ikhlas. Sekolah ini menerima kebijakan kurikulum nasional sebagai acuan utama pembelajaran, termasuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang menuntut guru untuk lebih kreatif dan adaptif dalam mengelola pembelajaran. Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, kebutuhan pelatihan guru, serta kendala dalam menyesuaikan materi ajar dengan karakteristik lokal dan nilai-nilai keislaman yang dianut oleh madrasah. Dukungan dana operasional sekolah dari pemerintah, seperti BOS, juga dirasakan membantu kegiatan belajar-mengajar, namun mekanisme pelaporannya yang kaku dan waktu pencairan yang tidak selalu tepat waktu menjadi hambatan tersendiri bagi fleksibilitas pengelolaan sekolah. Dampak kebijakan pendidikan juga terasa pada siswa, baik dalam hal akses maupun pengalaman belajar. Siswa mendapatkan manfaat berupa materi ajar yang lebih sistematis dan penguatan kompetensi yang lebih terarah, tetapi mereka juga mengalami tekanan akademik akibat penerapan standar nasional yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi lingkungan mereka. Beberapa siswa mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran daring atau tugas berbasis proyek karena keterbatasan teknologi dan dukungan belajar di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan, meskipun

memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan mutu pendidikan secara merata, belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan riil siswa di daerah.

### 3. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Penelitian ini mengangkat persoalan mendasar mengenai bagaimana peran pemerintahan dalam mengatur arah politik pendidikan nasional memberi dampak nyata terhadap satuan pendidikan, dalam hal ini MTs Al-Ikhlas Dalam Lidang, beserta seluruh ekosistemnya, termasuk siswa, guru, dan tata kelola sekolah. Dalam tataran ideal, pemerintah berperan sebagai pemegang otoritas dalam menentukan kebijakan pendidikan yang bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang merata, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa peran ini tidak selalu mudah diimplementasikan, karena berbagai tantangan muncul dalam tahap pelaksanaan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama, tidak serta merta dapat diterapkan secara efektif di semua satuan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah berbasis keagamaan di daerah. Di MTs Al-Ikhlas Dalam Lidang, tantangan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, hingga kesenjangan antara kebijakan nasional dan kondisi lokal. Implementasi kurikulum Merdeka Belajar, misalnya, menuntut perubahan besar dalam pola pikir dan strategi pembelajaran, yang tidak selalu mudah dilakukan oleh guru-guru yang sebelumnya terbiasa dengan pendekatan konvensional. Kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan intensif menjadi krusial, namun tidak selalu terpenuhi secara optimal.

Selain itu, aspek pendanaan juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun pemerintah menyediakan dana bantuan operasional seperti BOS, mekanisme pencairan yang lambat serta sistem pelaporan yang rumit sering kali menyulitkan pihak sekolah dalam mengelola program pendidikan secara fleksibel dan tepat waktu. Guru sebagai pelaksana utama kebijakan di ruang kelas juga menghadapi tantangan administratif yang cukup besar. Banyak dari mereka merasa terbebani oleh tumpukan laporan dan kegiatan birokratis yang menyita waktu, sehingga mengurangi fokus mereka terhadap kualitas pembelajaran. Dari sisi siswa, implementasi kebijakan pendidikan nasional juga belum sepenuhnya berpihak pada konteks lokal. Tantangan teknologi, seperti keterbatasan akses internet dan perangkat digital, membuat siswa di lingkungan madrasah ini sulit mengikuti model pembelajaran berbasis digital yang kini banyak dikembangkan. Ketika standar pembelajaran dan penilaian ditetapkan secara nasional tanpa mempertimbangkan disparitas wilayah, maka siswa-siswa di sekolah dengan keterbatasan akan selalu berada dalam posisi kurang diuntungkan.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini menggambarkan secara komprehensif peran pemerintah dalam politik pendidikan di MTs Al-Ikhlas Dalam Lidang serta implikasi kebijakan pendidikan terhadap praktik pembelajaran dan dinamika sekolah secara keseluruhan. Peran pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan, menjadi aktor sentral dalam penentuan arah pendidikan nasional yang berdampak langsung pada tata kelola madrasah, mulai dari penyusunan dan penetapan kurikulum, regulasi administratif, hingga penyediaan bantuan dana operasional. Kebijakan seperti penerapan kurikulum Merdeka Belajar menuntut transformasi pembelajaran yang lebih fleksibel dan kontekstual, membuka ruang bagi guru untuk mengadaptasi materi ajar sesuai nilai-nilai keislaman dan budaya lokal. Hal ini sejalan dengan pendapat Wardani et al., (2024) dan Sofiani et al., (2024) yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan harus mampu mengakomodasi keberagaman lokal untuk meningkatkan relevansi pembelajaran.

Namun, penelitian ini juga mengungkap berbagai kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Meski bantuan dana seperti BOS membantu penyediaan sarana dan prasarana, mekanisme pencairan yang terlambat dan administrasi yang ketat menghambat pengelolaan yang luwes. Guru-guru mengalami beban administratif yang cukup berat dan membutuhkan pendampingan pasca-pelatihan untuk mengoptimalkan pedagogi baru, yang menjadi bukti bahwa program peningkatan kapasitas tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Paparan ini sejalan dengan pernyataan Hasanah et al., (2025) dan Tarigan et al., (2019) yang mengungkapkan bahwa guru yang terbiasa dengan metode pembelajaran konvensional menghadapi kesulitan adaptasi terhadap paradigma Merdeka Belajar yang mengedepankan kreativitas dan kemandirian siswa, sebagaimana juga ditemukan dalam studi lain tentang tantangan kurikulum Merdeka di madrasah.

Dari sisi siswa, kebijakan pendidikan memberikan dampak ganda. Di satu sisi, mereka memperoleh akses materi yang lebih sistematis dan kompetensi yang terarah, namun di sisi lain mengalami tekanan akademik yang meningkat akibat standar penilaian nasional yang kompetitif dan kurang responsif terhadap kondisi lokal, terutama keterbatasan akses teknologi dan dukungan pembelajaran daring. Kondisi ini sejalan dengan kajian sebelumnya yang menyoroti kesenjangan digital dan ketidaksesuaian standar nasional dengan konteks daerah yang menghambat optimalisasi pembelajaran. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif, yang mempertimbangkan kondisi riil satuan pendidikan dan kebutuhan siswa di lapangan. Secara keseluruhan, temuan penelitian menegaskan bahwa politik pendidikan yang digerakkan oleh pemerintah memang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan pendidikan di madrasah. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pusat dengan kesiapan dan kondisi lokal. Kebijakan yang bersifat sentralistik tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lokal cenderung menemui kendala dalam penerapan dan berdampak kurang optimal pada kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan partisipatif dalam merancang kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada standar nasional, tetapi

juga pada pemberdayaan sumber daya manusia, fasilitasi teknologi, dan dukungan kontekstual yang sesuai dengan karakteristik madrasah dan lingkungan sekitar (Rahmafutri et al., 2024).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah melalui kebijakan politik pendidikan sangat menentukan arah dan pelaksanaan pendidikan di MTs Al-Ikhlas Dalam Lidang. Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, berperan penting dalam penyusunan kurikulum, pemberian regulasi, serta penyediaan dana operasional yang mendukung aktivitas belajar mengajar di madrasah tersebut. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar membawa perubahan signifikan yang menuntut adaptasi dari guru dan sekolah agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan budaya lokal dalam proses pembelajaran. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan pendidikan ini menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber daya, hambatan dalam pencairan dana, serta beban administratif yang cukup berat bagi tenaga pendidik. Guru-guru memerlukan pelatihan dan pendampingan yang lebih optimal agar mampu menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif dan kontekstual. Selain itu, kebijakan yang bersifat sentralistik belum sepenuhnya memperhatikan kondisi lokal, sehingga beberapa siswa mengalami kesulitan terutama terkait akses teknologi dan tantangan pembelajaran daring yang kurang mendukung. Dengan demikian, meskipun kebijakan pendidikan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan mutu dan pemerataan pendidikan, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan madrasah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi nyata di lapangan. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal serta dukungan berkelanjutan bagi tenaga pendidik agar pendidikan di madrasah dapat berjalan lebih efektif, relevan, dan inklusif bagi seluruh siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asdrayany, D., Najmi Muhajir, M., Fauzi, A., & Qurtubi, A. (2023). Analisis Konsep, Teori dan Lingkup Politik Pendidikan. *Journal on Education*, 06(01), 6840–6852.
- Bararah, I. (2020). Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal MUDARRUSUNA*, 10(2), 351–370. <http://dx.doi.org/10.22373/jm.v10i2.7842>
- Hasanah, W., Anderson, I., Simaremare, T. P., & Jambi, U. (2025). Analisis Kesulitan Guru dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 17 Tebo. *Pacific (Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 5(April), 60–77.
- Rahmad, S., Zulmuqim, & Zalnur, M. (2023). Politik Pendidikan Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia. *Kaisa: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(1), 21–31. <https://doi.org/10.56633/kaisa.v3i1.563>
- Rahmafutri, F., Deswita Sekolah Menengah Atas Negeri, E., & Trisoni, R. (2024). Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan. *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 45–55. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah/article/view/1050>
- Ridwan, I., & Sumirat, I. . (2021). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Pendidikan Karakter "Jawara"*, 7(1), 87–110. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v2i1.85>
- Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, Y. S. (2024). Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Serta Implmentasi Dalam Pendidikan di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1), 118–127. <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5273>
- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. penerbit Alfabeta.
- Tarigan, M. R. M., Purnama, A., Munir, M., & Azwar, E. (2019). Pengaruh Model Active Debate Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Materi Ekosistem Di Kelas X Madrasah Aliyah Swasta Proyek Univa Medan. *Jurnal Biolokus*, 2(1), 5. <https://media.neliti.com/media/publications/292801-studi-meta-analisis-pengaruh-video-pembe-7bf17271.pdf>
- Wardani, I. K., Nugroho, A. C., Sumardjoko, B., & Ati, E. F. (2024). Implementasi Pendidikan Multikultural dan Relevansinya dengan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(2), 2617–2626. <https://mail.jurnaldidaktika.org/contents/article/view/625%0Ahttps://mail.jurnaldidaktika.org/contents/article/download/625/488>
- Zulqaidah, Harahap, H., Tanjung, R. ., Dermawan, M. ., & Darmansah, T. (2024). Peran Kebijakan Kurikulum Merdeka Terhadap Kesiapan Guru dan Hasil Belajar Peserta Didik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5), 122–129.